

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anggriani, Jum. 2011. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Universitas Tama Jagakarsa. Jakarta.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung.
- Black, Henry Campbell. 1968. *Black's Law Dictionary*. West Publishing. St. Paul.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes & JT. Parake. 2018. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*. CV. Zigie Utama. Bengkulu.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group (Divisi Kencana). Jakarta.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, dkk.. 2020. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Hadiyanto, Alwan. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. CV: Media Sains Indonesia. Bandung.
- Hamid, Abd. Haris. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. CV. Sah Media. Makassar.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Harun, Nuria Siswi Enggarani, & Galang Taufani. 2018. *Hukum Administrasi Negara Di Era Citizen Friendly*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.

- Hasnati, Andrew Shandy Utama & Zul Hendrial. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Agen Perjalanan Wisata*. CV: Insan Cendekia Mandiri. Solok, Sumatera Barat.
- H.S., Salim. 2003. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. (Cetakan ke-13). Sinar Grafika. Jakarta.
- H.S., Salim. 2006, *Perkembangan Kontrak Diluar KUHPerdara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. CV ALFABETA. Bandung.
- Is, Muhamad Sadi & Kun Budianto. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Kencana. Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP. 2019. *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial*. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Edisi Kelima, Cetakan Ke-4). Liberty. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Pamungkasih, Rini. 2009. *101 Draft Surat Perjanjian dan Kontrak*. Gradien Mediatama. Yogyakarta.
- Pangestu, Muhammad Teguh. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. CV. Social Politic Genius (SIGn). Makassar.
- Patrik, Purwahid. 2004. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju. Bandung.
- Riyanto, Yayan. 2020. *Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia*. Media Nusa Creative. Malang.

- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Siagian, Ade Onny, dkk.. 2021. *Sistem Keuangan Era Digital*. CV Insan Cendekia Mandiri. Sumatra Barat.
- Sjadeini, Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengaruh Penelitian Hukum*. UII Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sudrajat, Tedi, & Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2014. *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana. Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta.
- Umraty & Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Makassar.
- Wulandari, Ratih. 2020. *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.

## B. Jurnal

- Anggraeni, Setyawati Fitri, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 4, 2018.
- Cahyaningsih, Diana Tantri, "Menyoal Pengawasan Industri Fintech Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Desember 2020.
- Chiasmastianto, Imanuel Adhitya Wulanata, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, April 2017.

- Dharma, Agustinus Danan Suka, *"Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia"*, Jurnal Repertorium, Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2015.
- Fitriadi, Mireza dan Sinung Driyo Subanar, *"Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia"*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 2, Juli 2014.
- Handoko, Muchamad & Made Warka, *"Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/ 2014"*, Mimbar Keadilan, Vol. 12, No. 1, Februari 2019 - Juli 2019.
- Hertanto, Ari Wahyudi, *"Urgensi Pengaturan Strict Liability Dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 41, No. 1, Januari-Maret 2011.
- Ilyas, Herlina & Mustakim Muchlis, *"Peran APIP dan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Good Village Governance: Pendekatan Konsep Muroqobah"*, ASSETS : Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi, Vol. 6, No. 2, Desember 2016.
- Lestari, Sulistyani Eka & Hardianto Djanggih, *"Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup"*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No. 2, April 2019.
- Nasution, AZ., *"Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999- LN 1999 No. 42"*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 32, No. 2, 2002.
- Nuridin, Aad Rusyad, *"Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan"*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 2, 2018.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani., dkk., *"Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia"*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9, No. 3, September 2020.
- Pambudi, Rakhmat Dwi, *"Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo"*, HARMONY, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.
- Priyonggojati, Agus, *"Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer"*

*Lending*”, Jurnal USM Law Review: Magister Hukum Universitas Semarang, Vol. 2, No. 2, 2019.

Rahman, Taufiq El, dkk., “*Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing*”, Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 3, Oktober 2011.

Rusli, Tami, “*Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 10, No. 1, Januari 2015.

Salamiah, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*”, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 12, Juli-Desember 2014.

Santi, Ernama, Budiharto, dan Hendro Saptono, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, Juli 2017.

Sinaga, Niru Anita, “*Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*”, Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2, Desember 2018.

Sulistiowati, “*Penerapan Prinsip Lisensi Dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik*”, Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3, Oktober 2012.

Turisno, Bambang Eko, “*Perlindungan Konsumen dalam Iklan Obat*”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41, No. 1, 2012.

Warassih, Esmi, “*Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional*”, Gema Keadilan, Vol. 5, No. 1, September 2018.

### C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Barkatullah, Abdul Halim. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*. Disertasi, Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Htg, Tamara Devani. 2020. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pembekuan Kegiatan Usaha Industri Jasa Keuangan Fintech Pada Kasus Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Rupiah Plus (Ditinjau Dari POJK Nomor 77 Tahun 2016)*”. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.

Maharani, Devi Kartika. 2020. Analisis Mengenai Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pengawasan Usaha Financial Technology.

Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.  
Yogyakarta.

Priliasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi  
Pinjaman Online (*The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer  
Lending*)". *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 49, No. 2, 2019.

Sari, Alfhica Rezita. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman  
Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer  
Lending Di Indonesia". Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

#### **D. Makalah / Pidato / Keterangan Ahli**

Djafar, Wahyudi. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". *Kuliah  
Umum: Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data*. Program Pasca  
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 26  
Agustus 2019. Diakses dalam [https://law.ugm.ac.id/wp-  
content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-  
Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf](https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf) pada 10 April 2022.

Hadad, Muliaman D.. (2017). *Financial Technology (Fintech) di Indonesia,  
Kuliah Umum tentang FinTech – IBS*, OJK Jakarta, 2 Juni 2017. Diakses  
pada 17 Januari 2022 dalam [http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20-  
%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf](http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20-%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf).

Hartono, Sri Redjeki. "Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi". Pidato  
Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1995. Diakses dalam  
<http://eprints.undip.ac.id/256/> pada 06 April 2022.

Martowardojo, Agus D.W.. "Sambutan Gubernur Bank Indonesia". *Pidato.  
Peresmian Fintech (Financial Teknologi) Office Bank Indonesia*.  
Jakarta. 14 November 2016. Diakses pada 17 Januari 2022 dalam  
<https://www.youtube.com/watch?v=JhY4SUn8n3U>.

#### **E. Koran**

Basuki, Orin. "OJK Selamat Asal DPR Diisi Orang Baik-Baik". *Kompas.com*.  
21 Desember 2011. Diakses dalam  
[https://money.kompas.com/read/2011/12/21/16005428/ojk.selamat.asal.  
dpr.diisi.orang.baik-baik](https://money.kompas.com/read/2011/12/21/16005428/ojk.selamat.asal.dpr.diisi.orang.baik-baik) pada 14 Februari 2022.

Fauzia, Mutia. "Peer to Peer Lending: Pengertian, Cara Kerja, dan Untung  
Ruginya". *Kompas.com*. 01 November 2021. Diakses dalam  
<https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer->



*lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya?page=all* pada 19 April 2022.

Hamdani, Trio – detikFinance. "Dinodai Pinjol Ilegal, Masyarakat Jadi Alergi Fintech". *Detik.com*. 10 Desember 2021. Diakses pada 14 Februari 2022 dalam <https://finance.detik.com/fintech/d-5849625/dinodai-pinjol-ilegal-masyarakat-jadi-alergi-fintech>.

Hardiansyah, Zulfikar. "Daftar 105 Pinjol dan 20 Investasi Ilegal yang Diblokir OJK". *Kompas.com*. 19 April 2022. Diakses dalam <https://tekno.kompas.com/read/2022/04/19/12150067/daftar-105-pinjol-dan-20-investasi-ilegal-yang-diblokir-ojk> pada 23 April 2022.

Purnamasari, Deti Mega, "Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA", *Kompas.com*, 28 Januari 2022. Diakses pada 26 Mei 2022 dalam laman <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/28/07171041/polisi-gerebek-lagi-pinjol-ilegal-di-pik-1-dari-27-orang-yang-diamankan>.

Purnamasari, Deti Mega, "Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2 Berawal dari Korban Lapor Diancam Saat Ditagih Utang", *Kompas.com*, 31 Januari 2022. Diakses pada 08 Juli 2022 dalam laman <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/31/15515661/penggerebekan-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-berawal-dari-korban-lapor?page=all>.

Ramli, Rully R., "Bunga Pinjol Turun Jadi 0,4 Persen Per Hari, Bos OJK: Masih Dirasa Terlalu Tinggi", *Kompas.com*, 16 November 2021. Diakses pada 26 Mei 2022 dalam <https://money.kompas.com/read/2021/11/16/140214026/bunga-pinjol-turun-jadi-04-persen-per-hari-bos-ojk-masih-dirasa-terlalu-tinggi>.

Riyanto, Galuh Putri. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta". *Kompas.com*. 23 Februari 2021. Diakses pada 03 Januari 2022 dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>.

Sari, Fitriana Monica. "6 Syarat jika Ingin Ajukan Kredit Modal Usaha di Bank". *Liputan6.com*. 03 Februari 2018. Diakses pada 15 Januari 2022 dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3251386/6-syarat-jika-ingin-ajukan-kredit-modal-usaha-di-bank>.

Sutrisna, Tria. "Digrebek Polisi, Pegawai Pinjol Ilegal Hanya Bisa Tertunduk dan Tutupi Wajah". *Kompas.com*. 27 Januari 2022. Diakses pada 11 Mei 2022 dalam laman <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/27/05000061/digrebek>

*polisi-pegawai-pinjol-ilegal-hanya-bisa-tertunduk-dan-tutupi?page=all.*

Syarifudin, Ahmad. "Cerita Karyawan di Sleman Terjerat Pinjol dan Diteror, Pinjam Rp 7 Juta Membengkak Rp 90 Juta". *TribunJogja.com*. 16 Oktober 2021. Diakses pada 15 Januari 2022 dari <https://jogja.tribunnews.com/2021/10/16/cerita-karyawan-di-sleman-terjerat-pinjol-dan-diteror-pinjam-rp-7-juta-membengkak-rp-90-juta>.

## F. Internet

Aldila, Nindya. (2019). "Masyarakat Diminta Hati-Hati dan Pahami Syarat Pinjaman Online". <https://finansial.bisnis.com/read/20191230/89/1185507/masyarakat-diminta-hati-hati-dan-pahami-syarat-pinjaman-online>. Diakses pada 17 Januari 2022.

Annur, Cindy Mutia. "Target Salurkan Pinjaman Rp 4 Triliun, Fintech Kredivo Bakal Gaet Bank". <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a495b1d1d3/target-salurkan-pinjaman-rp-4-triliun-fintech-kredivo-bakal-gaet-bank>. Diakses pada 24 Mei 2022.

Bank Indonesia. "Profil Bank Indonesia". <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx>. Diakses pada 13 Februari 2022.

Bank Indonesia. (2019). "Peran Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Digitalisasi Ekonomi Dan Keuangan Di Indonesia". <https://www.bi.go.id/en/bi-institute/publikasi/Pages/BI-Mengajar-2019.aspx>. Diakses pada 14 Februari 2022.

BBC News Indonesia. (2021). "Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat Lintah Digital". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>. Diakses pada 18 Januari 2022.

Burhan, Fahmi Ahmad. "Transaksi Paylater Tokopedia Melejit, tapi Shopee Pemimpinnya". <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61de796484c55/transaksi-paylater-tokopedia-melejit-tapi-shopee-pemimpinnya>. Diakses pada 27 Mei 2022.

CNN Indonesia. (2021). "Bahaya Data Pribadi yang Dicuri". <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210108121603-185-591120/bahaya-data-pribadi-yang-dicuri>. Diakses pada 17 April 2022.



- CNN Indonesia. (2021). "OJK Bangun Pusat Data Buat Awasi Transaksi Fintech". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210621135849-83-657248/ojk-bangun-pusat-data-buat-awasi-transaksi-fintech>. Diakses pada 20 Januari 2022.
- CNN Indonesia. (2021). "Dapat Aduan Pinjol Ilegal, OJK Akui Tak Tahu Harus Hubungi Kemana". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211204141341-78-729817/dapat-aduan-pinjol-ilegal-ojk-akui-tak-tahu-harus-hubungi-kemana>. Diakses pada 18 Januari 2022.
- Evandio, Akbar. (2021). "Marak Pinjol Ilegal, Kepercayaan Masyarakat Berisiko Menurun". <https://finansial.bisnis.com/read/20210716/563/1418374/marak-pinjol-ilegal-kepercayaan-masyarakat-berisiko-menurun>. Diakses pada 18 April 2022.
- Fauzan, Herdanang Ahmad. (2021). "Sri Mulyani: Transaksi Ekonomi Digital RI Terbesar di Asia Tenggara". <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211211/9/1476460/sri-mulyani-transaksi-ekonomi-digital-ri-terbesar-di-asia-tenggara>. Diakses pada 16 Januari 2022.
- Go Kredit. "Tentang Go Kredit". <http://www.mitra-dana.id/mobile.html>. Diakses pada 24 Mei 2022.
- Go Kredit. "Produk". <http://www.mitra-dana.id/mobile.html>. Diakses pada 24 Mei 2022.
- Go Kredit. "Petunjuk Pengajuan Pinjaman". <http://www.mitra-dana.id/mobile.html>. Diakses pada 24 Mei 2022.
- Hadyan, Rezha. (2022). "Data Pribadi Bocor Lagi, RUU Perlindungan Data Pribadi Makin Mendesak". <https://kabar24.bisnis.com/read/20220109/15/1486824/data-pribadi-bocor-lagi-ruu-perlindungan-data-pribadi-makin-mendesak>. Diakses pada 18 April 2022.
- Imansyah. (2016). "Urgensi Perlunya Pengaturan Financial Technology". <https://mediaindonesia.com/opini/78124/urgensi-perlunya-pengaturan-financial-technology-1>. Diakses 18 Januari 2022.
- Iswara, Padjar, (2022), "Hasil Riset Kredivo dan KIC: Konsumen Makin Meminati Paylater", <https://katadata.co.id/padjar/digital/62988d6b0e9e8/hasil-riset->

*kredivo-dan-kic-konsumen-makin-meminati-paylater*, Diakses pada 08 Juli 2022.

Jayani, Dwi Hadya. (2021). "Bahaya Kebocoran Data Pribadi". <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/61398d76a4324/bahaya-kebocoran-data-pribadi>. Diakses pada 17 April 2022.

JP, Slamet. (2021). "Pengguna Internet di Indonesia". <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/pengguna-internet-di-indonesia>. Diakses pada 03 Januari 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). "Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Perjuangkan Hak Sebagai Konsumen". <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pentingnya-peran-aktif-masyarakat-perjuangkan-hak-sebagai-konsumen/>. Diakses pada 06 April 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). "Fintech Percepat Target Inklusi dan Dorong Inovasi Keuangan". <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/fintech-percepat-target-inklusi-dan-dorong-inovasi-keuangan/>. Diakses pada 04 April 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). "Multiplier Effect Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bandara Kediri". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13957/Multiplier-Effect-Proyek-Strategis-Nasional-Pembangunan-Bandara-Kediri.html>. Diakses pada 18 April 2022.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika). (2021). "Satgas Sudah Blokir 3.631 Pinjol Ilegal per 12 November 2021". <https://aptika.kominfo.go.id/2021/11/satgas-sudah-blokir-3-631-pinjol-ilegal-per-12-november-2021/>. Diakses pada 23 April 2022.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2021). "MenKopUKM Dorong Ekspor Kelapa Melalui Koperasi". <https://kemenkopukm.go.id/read/menkopukm-dorong-ekspor-kelapa-melalui-koperasi>. Diakses pada 18 Januari 2022.

Kredivo. "Disclaimer Risiko". <https://www.kredivo.id/p/in/disclaimer.html>. Diakses pada 10 April 2022.

Kredivo. "FAQ / Pertanyaan yang sering ditanyakan". <https://www.kredivo.id/faqs/>. Diakses pada 24 Mei 2022.

Kredivo. "Mengapa Menggunakan Kredivo?". <https://www.kredivo.id/buy/>. Diakses pada 24 Mei 2022.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). "MK: Independensi OJK Tidak Bersifat Mutlak". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11657>. Diakses pada 14 Februari 2022.

Media Digital - Bisnis.com. (2018). "5 Keuntungan Menggunakan P2P Lending Indonesia". <https://finansial.bisnis.com/read/20180815/89/828215/5-keuntungan-menggunakan-p2p-lending-indonesia>. Diakses pada 17 Januari 2022.

Nizar, Muhammad Afdi. (2017). "Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia". <https://www.researchgate.net/publication/323629323>. Diakses pada 13 Februari 2022.

OCBC Nisp. (2022). "Mengenal AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia". <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2022/01/17/afpi-adalah>. Diakses pada 22 April 2022.

Octaviano, Adrianus, (2022), "OJK Cabut Izin Uang Teman, Jumlah Pinjol Berizin Menjadi 102", <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-cabut-izin-uangteman-jumlah-pinjol-berizin-menjadi-102>, Diakses pada 08 Juli 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. "FAQ Otoritas Jasa Keuangan". <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>. Diakses pada 14 Februari 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. "Profil Satgas". <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Profil-Satgas.aspx>. Diakses pada 28 Mei 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. "Yuk mengenal FinTech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun". <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>. Diakses pada 04 April 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). "Buku Saku OJK Edisi II". <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Saku-OJK-Edisi-II.aspx>. Diakses pada 14 Februari 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). "FAQ Fintech Lending". <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan->

*statistik/direktori/fintech/Pages/FAQ-Kategori-Umum.aspx*. Diakses pada 13 Februari 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). "Petunjuk dan Panduan Penggunaan APPK bagi Konsumen". Diakses pada 11 Mei 2022 dalam laman <https://kontak157.ojk.go.id/APPKPublicPortal/FileList/Index/10004>.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). "Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal". <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>. Diakses pada 18 Januari 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). "Permintaan Tanggapan Atas RPOJK tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan". <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Pages/Permintaan-Tanggapan-Atas-RPOJK-tentang-Perlindungan-Konsumen-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>. Diakses pada 22 April 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). "Penting Simak Bedanya Ini Ciri-Ciri Pinjol Legal dan Ilegal". Diakses pada 11 Mei 2022 dalam laman <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). "Siaran Pers: Tingkatkan Edukasi Keuangan Masyarakat, OJK Luncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025". Diakses pada 16 Februari 2022 dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Tingkatkan-Edukasi-Kuangan-Masyarakat,-OJK-Luncurkan-Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 – 2025". <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>. Diakses pada 19 Januari 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). "Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022". <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>. Diakses pada 17 Januari 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). "Statistik Fintech Lending Periode November 2021". <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>. Diakses pada 17 Januari 2022.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 2 Maret 2022”. Diakses pada 19 April 2022 dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). “Siaran Pers: Kembangkan Pengawasan Berbasis Digital OJK Luncurkan Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA)”. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kembangkan-Pengawasan-Berbasis-Digital-OJK-Luncurkan-Suptech-Integrated-Data-Analytics-\(OSIDA\).aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kembangkan-Pengawasan-Berbasis-Digital-OJK-Luncurkan-Suptech-Integrated-Data-Analytics-(OSIDA).aspx). Diakses pada 23 April 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). “Siaran Pers: Peningkatan Perlindungan Konsumen di IKNB, OJK Keluarkan Ketentuan Penyempurnaan PAYDI dan Fintech Lending”. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Peningkatan-Perlindungan-Konsumen-di-IKNB.aspx>. Diakses pada 23 April 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). “Statistik Fintech Lending Periode Februari 2022”. Diakses pada 19 April 2022 dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Stat.aspx>.
- Pahlevi, Reza. (2022). “YLKI: Aduan Konsumen Pinjaman Online Terbanyak selama 2021”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/ylki-aduan-konsumen-pinjaman-online-terbanyak-selama-2021>. Diakses pada 18 Januari 2022.
- Permatasari, Erizka. 2021. “Asas-asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9>. Diakses pada 30 Mei 2022.
- PT Privy Identitas Digital. “FAQ”. <https://privy.id/id/faq/umum>. Diakses pada 26 Mei 2022.
- Pratama, Wibi Pangestu. (2021). “Pinjol Ilegal Masih Marak, SWI: Perlu Ada UU Fintech dan UU Perlindungan Data Pribadi”. <https://finansial.bisnis.com/read/20210714/563/1417565/pinjol-ilegal-masih-marak-swi-perlu-ada-uu-fintech-dan-uu-perlindungan-data-pribadi>. Diakses pada 18 Januari 2022.
- Suryacahya, Ferdinand Waskita. “Gerebek Pinjol Ilegal di PIK, Polda Metro Jaya Bicara Soal Ancaman dan Anak di Bawah Umur”.

*<https://jakarta.tribunnews.com/2022/01/28/update-gerebek-pinjol-ilegal-di-pik-polda-metro-jaya-bicara-soal-ancaman-dan-anak-di-bawah-umur?page=all>. Diakses pada 29 Mei 2022.*

Yati, Rahmi. (2022). "YLKI Terima 535 Pengaduan Sepanjang 2021, Jasa Keuangan Mendominasi".  
*<https://finansial.bisnis.com/read/20220107/90/1486477/ylki-terima-535-pengaduan-sepanjang-2021-jasa-keuangan-mendominasi>*. Diakses pada 18 Januari 2022.

Wijayaatmaja, Yakub Pryatama. "Gerebek Pinjol Ilegal Bernama Jie Chu Technology, Polisi Tetapkan 3 Tersangka".  
*<https://mediaindonesia.com/megapolitan/468212/gerebek-pinjol-ilegal-bernama-jie-chu-technology-polisi-tetapkan-3-tersangka>*. Diakses pada 29 Mei 2022.

#### **G. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.



Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

## **H. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 04 Agustus 2015.

## **I. Hasil Wawancara dengan Narasumber**

Tim Banit 2 Subdit II/Tipideksus Ditreskrimsus Polda DIY. 2022. “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer to Peer Lending*)”. Hasil Wawancara Pribadi: 9 Maret 2022, Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Asisten Tindak Pidana Umum (Jaksa Madya) Kejaksaan Tinggi DIY. 2022. “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer to Peer Lending*)”. Hasil Wawancara Pribadi: 30 Maret 2022, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Staf Direktorat Perlindungan Konsumen. 2022. “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer to Peer Lending*)”. Hasil Wawancara Pribadi: 17 Maret 2022, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Deputi Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK. 2022. “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer to Peer Lending*)”. Hasil Wawancara Pribadi: 30 Maret 2022, Otoritas Jasa Keuangan DKI Jakarta.

Staf dan Deputi Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK. 2022. “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer to Peer Lending*)”. Hasil Wawancara Pribadi: 04 April 2022, Otoritas Jasa Keuangan DKI Jakarta.

Tim Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan. 2022. “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer to Peer Lending*)”. Hasil Wawancara Pribadi: 06 April 2022, Otoritas Jasa Keuangan DKI Jakarta.